

BAB 1

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sekitar tahun 1970-an dengan merebaknya masalah lingkungan. Hal ini ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dengan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun melahirkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johannesburg 2002, menekankan perlunya koordinasi dan integrasi SDA, SDM, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat (*society*), lingkungan (*environment*), dan ekonomi (*economy*) Von Stoker et al (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007: 22). Dalam pembangunan berkelanjutan, SDA tidak hanya sekedar dieksploitasi untuk mengejar nilai ekonomis saja, melainkan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Artinya, dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan, memerlukan upaya yang sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering pula dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pem ulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Budiyanto, 2013). Oleh karena itu, dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni (1) pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana; (2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan (3) peningkatan kualitas hidup generasi.

Perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ke arah pembangunan yang berkualitas suatu pembangunan yang tidak hanya mengejar jumlah tetapi menuju mutu, bukan hanya seberapa besar kemakmuran material bisa dicapai tetapi bagaimana mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hanya dalam iklim pembangunan yang demikianlah kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup mampu menjelma dalam kemauan politik yang kuat dan didukung oleh semua kalangan (UI Press. Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, 2008)

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan dan perubahan tatanan kehidupan bangsa yang sesuai dengan tuntutan rakyat, telah memunculkan arus perubahan yang bernama reformasi. Reformasi mengharuskan pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian kebijaksanaan, salah satunya kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijaksanaan itu mengarahkan kepada perkembangan yang berkelanjutan, mewujudkan integritas dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pada kelestarian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dengan mengintegrasikan semua komponen. Aktivitas masyarakat sendiri menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa manusia (penduduk) memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sebagai pendukung atau pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya-upaya pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat di suatu daerah secara sistematis dan terencana dengan baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemitraan di dalam masyarakat itu sendiri menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkungan masyarakat di sekitar meningkatkan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan mereka dan memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat.

Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, masyarakat berhak untuk berperanserta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan.

Pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya.

Upaya pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat di suatu daerah secara sistematis dan terencana dengan baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemitraan di dalam masyarakat itu sendiri menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkungan masyarakat di sekitar meningkatkan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan mereka dan memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat. Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, masyarakat berhak untuk berperanserta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup sejalan dengan pendekatan dalam pembangunan dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Pendekatan ini telah mengundang kebangkitan kembali dengan semangat baru yang lebih bersifat partisan pembangunan masyarakat. Pendekatan pembangunan seperti ini merupakan suatu elemen dasar dari suatu strategi pembangunan yang lebih luas, bertujuan untuk mencapai suatu transformasi berdasarkan nilai-nilai yang berpusat pada manusia dan potensi-potensi yang ditawarkan oleh teknologi maju berdasarkan informasi. Pembangunan yang berpusat pada manusia, memandang

manusia sebagai warga masyarakat, sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan, dan nampaknya dapat dipandang sebagai suatu strategi alternatif pembangunan masyarakat yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang- bidang lain, khususnya bidang ekonomi.

Pembangunan masyarakat yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang- bidang lain, khususnya bidang ekonomi. Paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber – sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup dan perilaku mereka (Tjokrowinoto, 1996:45). Paradigma ini adalah suatu perspektif atau pandangan environment development dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang gerak yang sangat penting sebagai kekuatan di luar negara, dalam hal ini masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk proaktif dalam proses pembangunan lingkungan hidup. Peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu diberdayakan. Adapun organisasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi yang berpotensi sebagai wadah informasi dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu kelompok tani, LSM yang ada, satuan – satuan masyarakat adat, dan kelompok masyarakat konservasi. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut selain membantu pemerintah, dapat pula berfungsi sebagai agen pembaharu dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan

arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung, yaitu ‘Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera’.

Dalam usaha pemberian peran secara nyata oleh pemerintah terhadap masyarakat dan keterlibatannya terhadap proses pembangunan lingkungan dapat diwujudkan dengan cara dilibatkannya masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan hingga evaluasi pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kepedulian dan rasa memiliki atas setiap program pembangunan terutama yang berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan. Maksud yang lain adalah agar ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dikurangi karena tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kesuksesan, kesinambungan dan pengembangan program yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam kaitan ini peran masyarakat secara individu dan kelompok adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai agen pembaharu, yang pada akhirnya melalui kelompok inilah dimulai perubahan budaya dan perilaku masyarakat dari yang acuh tak acuh menjadi masyarakat yang peduli dan sadar lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan berwawasan lingkungan, mau tidak mau, adalah merupakan keharusan bagi pemerintah ataupun masyarakat. Dalam penelitian ini, Pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan, khususnya Kota Bandung. Pentingnya peran pemerintah daerah tersebut sejalan dengan kehidupan sosial ekonomi

masyarakat Kota Bandung, yang sebagian besar memanfaatkan dan menggantungkan pada SDA yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi SDA sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah daerah, sekaligus sumber kehidupan masyarakat, pemerintah dan masyarakat harus membangun komitmen bersama untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan dan ekologis. Bagaimanapun, peran pemerintah daerah yang diberikan mandat oleh rakyatnya, menjadi kunci dalam menginisiasi dan mempromosikan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan SDA yang tersedia. Artinya, kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, akan sulit tercapai jika tidak melibatkan masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1
Identifikasi Masalah Lingkungan Kota Bandung

No.	Permasalahan	Keterangan
1.	Pencemaran Limbah Industri	Belum Teratasi
2.	Banjir	Belum Teratasi
3.	Pencemaran Limbah Domestik (Limbah Rumah Tangga)	Belum Teratasi
4.	Perubahan Tata Guna Lahan dan Lahan Kritis	Belum Teratasi
5.	Perubahan Perilaku Masyarakat	Belum Teratasi
6.	Kerusakan/berkurangnya Sumber Air	Belum Teratasi
7.	Penaatan Penegak Hukum	Belum Teratasi

Sumber: dokumen BPLHD (2014)

Pembangunan yang selama ini mengutamakan pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan masalah-masalah seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain (**Korten**, 2001). Dalam kaitannya dengan definisi tersebut maka **Mikkelsen** (1995) berpendapat bahwa pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan yakni apa yang dilakukan oleh suatu negara agar

dapat membangun dan berkembang. Kebijakan ini tentunya bukan hanya kebijakan pemerintah pusat saja namun juga termasuk kebijakan pembangunan pemerintah daerah terutama di dalam merencanakan pembangunan daerah.

Menurut Kartasasmita (1996: 11), menyatakan bahwa:
 ‘pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya masyarakat yang mandiri dan kemandirian daerah itu sendiri merata di seluruh tanah air’

Karena itu, pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji dan membuat penulis tertarik kepada judul **Strategi Pemerintah Kota Dalam Pembangunan berbasis lingkungan** untuk menjadi objek kajian penulis

B. Identifikasi Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis menemukan berbagai permasalahan dalam strategi pemerintah kota dalam Pembangunan berbasis Lingkungan khususnya di masyarakat Kota Bandung. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya gerakan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Bandung
2. Belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan berbasis lingkungan
3. Belum maksimalnya hasil yang didapat oleh masyarakat dari program pemerintah dalam menciptakan kebersihan dan kelestarian lingkungan

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan?
2. Bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan berbasis lingkungan?
3. Apa saja kendala dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum untuk menganalisis Strategi Pemerintah Kota dalam Pembangunan Berbasis Lingkungan. Sedangkan secara khusus peneliti ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk strategi pemerintah kota dalam pembangunan berbasis lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan
2. Mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kota yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan
3. Mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana strategi pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan untuk Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera sesuai dengan visi Kota Bandung sebagaimana mestinya.

Penelitian ini memiliki peranan penting bagi mahasiswa PKn yang mana jika dilihat dari objek kajian *civics* salah satunya adalah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam Sistem

Politik Indonesia. Peneliti memberikan deskriptif mengenai salah satu dari objek kajian itu sehingga dapat memberikan gambaran mengenai program pemerintah yang merupakan implemetasi dari program pemerintah.

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus ke lapangan sehingga penulis bisa mendapatkan pengalaman secara langsung di lapangan mengenai strategi pemerinah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan. Peneliti ini diharapkan mampu memberikan pengalaman empiris kepada penulis tentang kondisi *real* mengenai bagaimana strategi Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan berbasis lingkungan, serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap Strategi pemerintah Kota Bandung tersebut berdasarkan pengalaman di lapangan.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pembuat dan pelaksana pembangunan Kota Bandung sebagai bahan evaluasi untuk kemudian diadakan tindak lanjut berupa peninjauan kembali hasil dari program tersebut.

3. Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai strategi kebijakan pemerintah kota kepada seluruh elemen yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemikiran dan analisisnya untuk menanamkan kesadaran, bahwa pemerintah dan masyarakat di Kota Bandung memiliki kewajiban yang sama untuk menjadikan Kota Bandung Unggul, Nyaman, Indah dan Sejahtera.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain :

BAB I: PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN, berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan pembahasan serta analisis hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN & SARAN, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian dan saran dari peneliti.